Copyright © 2026 pada penulis
***Madaniya*, Vol. 7, No. 4, November 2026**

Sosialisasi dan Pelatihan Dasar tentang Konsep Ekowisata berbasis Potensi Lokal, Partisipasi Masyarakat, Spasial dan Penguatan Tata Kelola Wisata Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Desa Secara Berkelanjutan di Desa Palipi Soreang, Kabupaten Majene

Nur Adyla Suriadi [1], Windy Septi Sintia [2]*, Rafid Mahful [3], Virda Evi Yanti Deril [4], Zul Asriana [5], Astinawaty [6], Ummu Kalsum Basman [7], Amirul Asnan Cirua [8], Sadly Ramli [9], Ellyni Dwi Fortuna [10]

[1–7] Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat
[8, 9] Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat
[10] Prodi Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat

* windyseptisinta@unsulbar.ac.id

Abstrak

Pengembangan wisata di Desa Palipi Soreang, Kabupaten Majene, memiliki potensi pesisir dan budaya yang beragam, namun terhambat oleh pencemaran sampah pesisir, kerusakan fasilitas pendukung, serta keterbatasan kapasitas masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam merencanakan ekowisata berbasis potensi lokal, pemetaan partisipatif, dan penguatan tata kelola secara berkelanjutan. Metode pelaksanaan meliputi persiapan, evaluasi awal, penyuluhan konsep ekowisata, lokakarya pemetaan spasial, perencanaan kebutuhan fasilitas, serta evaluasi akhir. Kegiatan diikuti oleh 30 peserta yang terbagi ke dalam tujuh kelompok sasaran, yaitu pemerintah desa, kelompok sadar wisata, kelompok pemuda, pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta perajin tenun, pengelola destinasi, tokoh masyarakat, dan warga desa. Hasil utama menunjukkan kelompok pemuda dan pengelola destinasi berhasil menyusun peta cetak dan digital potensi serta masalah wisata, kelompok pemerintah desa dan tokoh masyarakat merumuskan matriks pembagian peran kelembagaan, sedangkan kelompok pelaku usaha dan warga mengidentifikasi prioritas kebutuhan fasilitas. Secara kolektif, rata-rata nilai pemahaman peserta meningkat dari 57,00 menjadi 94,00 dengan manfaat berupa ketersediaan instrumen perencanaan desa dan kesadaran pelestarian pesisir. Kesimpulannya, integrasi pemetaan spasial partisipatif dan perencanaan fasilitas ini menghadirkan pendekatan baru yang mentransformasi keterlibatan masyarakat pesisir dari objek pembangunan menjadi perencana aktif destinasi wisata berkelanjutan.

Kata Kunci: *ekowisata pesisir, kapasitas masyarakat, pemetaan partisipatif, perencanaan fasilitas wisata, tata kelola pariwisata desa*

https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/2042

Pendahuluan

Pengembangan pariwisata perdesaan dewasa ini telah bertransformasi dari sekadar penyediaan ruang rekreasi konvensional menjadi instrumen strategis pembangunan wilayah yang menempatkan desa sebagai ruang hidup dengan integrasi sumber daya alam, tradisi budaya, dan sistem sosial-ekonomi yang wajib dijaga keberlanjutannya. Dalam paradigma perencanaan wilayah dan kota modern, keberhasilan destinasi wisata perdesaan dan pesisir tidak lagi diukur semata-mata dari intervensi pembangunan infrastruktur fisik yang bersifat top-down, melainkan dari seberapa kuat kapasitas masyarakat lokal ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ruang (Giampiccoli & Saayman, 2018; Dolezal & Novelli, 2022). Tanpa perencanaan terintegrasi yang bertumpu pada pendekatan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat (*community-based tourism*), eksploitasi daya tarik wisata justru berisiko melampaui daya dukung lingkungan, memicu degradasi ekosistem pesisir, serta menghasilkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi bagi warga lokal (Stone & Nyaupane, 2018; Higgins-Desbiolles, 2020). Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat tapak dalam mengenali potensi spasial, menganalisis permasalahan kawasan, serta merancang tata kelola kelembagaan yang kolaboratif menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang inklusif dan lestari (Bello et al., 2018; Lee & Jan, 2019).

Secara spesifik, urgensi penguatan kapasitas perencanaan pariwisata ini tercermin pada analisis situasi mitra di Desa Palipi Soreang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki luas wilayah 4,12 km², terbagi ke dalam lima dusun (Lambe, Kanappe, Labu-Labuang, Alinduang, dan Batu-Batu), serta berbatasan langsung dengan perairan Selat Makassar di sisi barat. Bentang geografis pesisir dan kekayaan kultural tersebut menyimpan potensi multisektoral yang sangat besar, mulai dari wisata alam dan bahari seperti Bukit Palluang Boko dan Depaso Beach, hingga wisata budaya tenun tradisional lipa sa'be, wisata sejarah, dan wisata religi, yang ditopang oleh modal sosial masyarakat nelayan, petani, serta organisasi kepemudaan. Namun demikian, hasil observasi lapangan dan evaluasi kondisi dasar (*baseline*) terhadap 30 orang perwakilan mitra sasaran yang terdiri atas perangkat pemerintah desa, kelompok pemuda/Karang Taruna, pengelola destinasi, pelaku UMKM/perajin, dan tokoh masyarakat mengungkapkan adanya tiga persoalan mendasar yang menghambat daya saing destinasi. Pertama, terjadinya degradasi kualitas lingkungan pesisir akibat akumulasi sampah kiriman laut dan timbulan sampah domestik rumah tangga. Kedua, keterbatasan ketersediaan serta kerusakan fisik sarana prasarana pendukung wisata seperti aksesibilitas jalan, sanitasi/toilet, tempat sampah, gazebo, dan papan informasi yang menurunkan minat kunjungan wisatawan. Ketiga, belum optimalnya kapasitas perencanaan dan tata kelola wisata di tingkat lokal.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tim pengabdi dari Pusat Studi Perencanaan, Lingkungan dan Pariwisata Universitas Sulawesi Barat menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang komprehensif dan terstruktur melalui empat intervensi program kerja utama. Pertama, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi konsep dasar ekowisata, prinsip pariwisata berkelanjutan, manajemen kebersihan lingkungan dan daya dukung kawasan pesisir, serta tata kelola kelembagaan wisata berbasis kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder*). Kedua, penyelenggaraan lokakarya identifikasi dan pelatihan pemetaan partisipatif (*participatory mapping*), di mana masyarakat dilatih secara

langsung untuk mengorientasikan wilayah, menggunakan simbol informasi spasial, serta memetakan titik sebaran potensi daya tarik wisata, jaringan aksesibilitas, kondisi infrastruktur, dan titik krusial permasalahan lingkungan baik ke dalam media peta cetak maupun peta digital. Ketiga, fasilitasi analisis kesenjangan (*gap analysis*) dan perencanaan kebutuhan fasilitas wisata untuk menyusun matriks skala prioritas penyediaan serta pemeliharaan sarana dasar dan pendukung berdasarkan urgensi lapangan dan ketersediaan sumber daya desa. Keempat, perumusan matriks pembagian peran kelembagaan antaraktor (pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata/Pokdarwis, pemuda, perajin UMKM, dan masyarakat umum) guna menghasilkan dokumen rekomendasi awal pengembangan wisata Desa Palipi Soreang yang terarah.

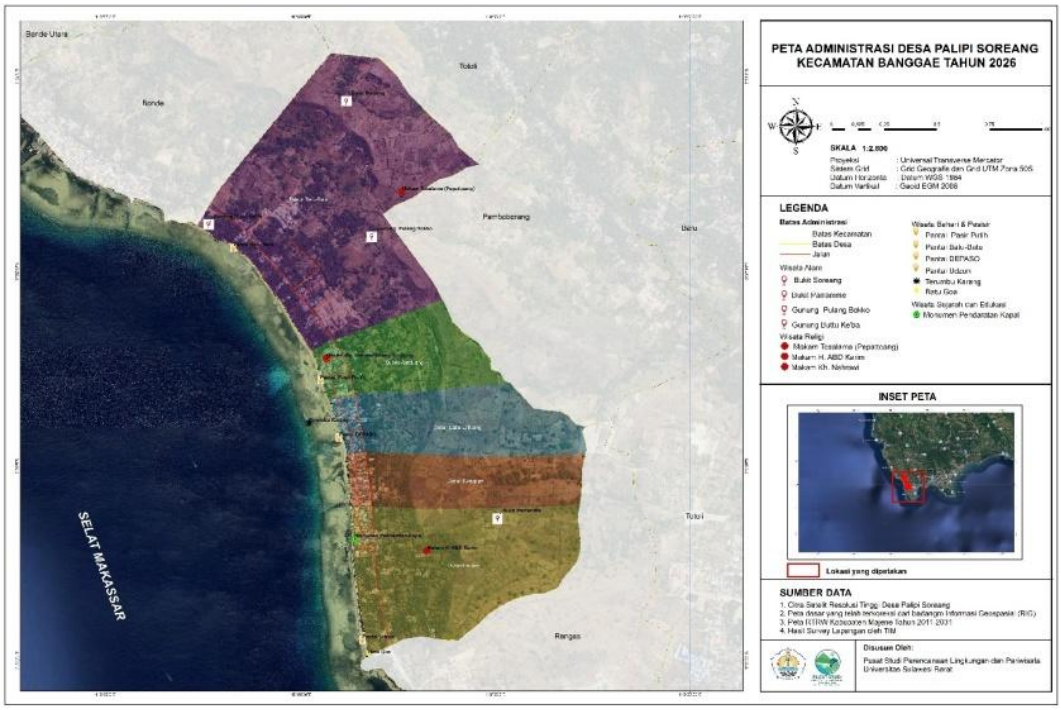
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam merencanakan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal melalui edukasi ekowisata, pelatihan pemetaan partisipatif, identifikasi kebutuhan fasilitas, serta penguatan tata kelola wisata. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan wisata, memahami kebutuhan pengembangan destinasi, serta menyusun arahan pengembangan wisata yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung pengembangan pariwisata Desa Palipi Soreang yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penguatan kapasitas lokal.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis dengan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif yang mengintegrasikan metode penyuluhan konseptual, lokakarya pemetaan spasial, dan perencanaan aksi tata kelola fasilitas. Uraian rinci mengenai kelima aspek metode pelaksanaan kegiatan disajikan sebagai berikut.

Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Palipi Soreang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis dan spasial, lokasi mitra merupakan wilayah perdesaan pesisir yang memiliki luas sekitar 4,12 km², terbagi ke dalam lima wilayah administratif dusun (Dusun Lambe, Kanappe, Labu-Labuang, Alinduang, dan Batu-Batu), serta berbatasan langsung dengan perairan Selat Makassar di sebelah barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan variasi potensi daya tarik wisata unggulan yang membutuhkan intervensi perencanaan spasial dan penguatan tata kelola lingkungan. Rangkaian kegiatan lapangan dilaksanakan secara intensif dan terstruktur pada tahun 2026 dalam satu hari kerja penuh, terhitung mulai pukul 08.30 hingga 15.30 WITA, yang bertempat di aula pertemuan Desa Palipi Soreang.



***Gambar 1**. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene*

Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Khalayak sasaran atau mitra dalam program pengabdian ini berjumlah 30 orang peserta yang merupakan representasi elemen pemangku kepentingan (multi-stakeholder) lokal di Desa Palipi Soreang. Peserta terdiri atas tujuh unsur utama, yaitu: (a) aparatur Pemerintah Desa dan perangkat desa; (b) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengelola destinasi wisata lokal; (c) organisasi kepemudaan dan Karang Taruna; (d) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perajin tenun lipa sa'be di kawasan wisata; (e) tokoh masyarakat dan tokoh adat; serta (f) warga desa yang memiliki ketertarikan langsung terhadap pengembangan ekowisata. Penentuan khalayak sasaran dilakukan secara *purposive* (bertujuan) melalui tahapan koordinasi awal dan identifikasi kebutuhan bersama Pemerintah Desa Palipi Soreang (diwakili oleh Kepala Desa, Wardin Wahid, S.H.), dengan kriteria utama bahwa peserta memiliki keterkaitan fungsional, pengaruh sosial, serta peran langsung dalam pengelolaan aktivitas pariwisata dan pemeliharaan lingkungan pesisir desa.

Metode Pengabdian

Metode pengabdian diimplementasikan ke dalam enam tahapan operasional yang berkesinambungan untuk mentransformasi kapasitas kognitif dan keterampilan praktis masyarakat.

Tahap Persiapan dan Koordinasi

Tim pengabdi Pusat Studi Perencanaan, Lingkungan dan Pariwisata Universitas Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi perizinan dan penyelarasan program bersama pemerintah desa, mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terkait

pengembangan wisata, menetapkan daftar 30 peserta sasaran, serta menyusun modul bahan ajar, instrumen evaluasi (pre-test dan post-test), peta dasar citra wilayah, dan perlengkapan konstruksi papan informasi peta.

Tahap Registrasi dan Pengukuran Awal (Pre-Test)

Dilaksanakan pada pukul 08.30–09.00 WITA, meliputi registrasi daftar hadir peserta, pembukaan resmi oleh Kepala Desa Palipi Soreang dan Kepala Pusat Studi (Nur Adyla S., S.T., M.T.), serta pengisian kuesioner pre-test untuk memetakan tingkat pemahaman dasar (baseline) peserta sebelum intervensi materi diberikan.

Tahap Penyuluhan / Sosialisasi Konsep Ekowisata dan Tata Kelola Wisata

Dilaksanakan pada pukul 09.00–11.00 WITA melalui metode ceramah interaktif, pemaparan visual, dan diskusi tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup enam pokok bahasan: (1) konsep dasar pariwisata dan ekowisata; (2) prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan; (3) teknik identifikasi potensi lokal sebagai daya tarik wisata; (4) peran aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata; (5) manajemen kebersihan lingkungan pesisir dan daya dukung destinasi; serta (6) konsep kelembagaan dan tata kelola wisata kolaboratif.

Tahap Pelatihan dan Demonstrasi Pemetaan Partisipatif (Participatory Mapping)

Dilaksanakan pada pukul 11.00–12.00 WITA melalui metode lokakarya praktik langsung (hands-on workshop). Tim pengabdi mendemonstrasikan cara membaca peta dasar, orientasi spasial wilayah, dan penggunaan simbol informasi keruangan serta aplikasi pemetaan. Selanjutnya, peserta didampingi secara aktif untuk mengidentifikasi dan menandai titik lokasi potensi daya tarik wisata, jaringan jalan dan aksesibilitas, sebaran fasilitas eksisting, serta titik-titik krusial permasalahan lingkungan (seperti penumpukan sampah pesisir) secara langsung pada peta cetak berukuran besar menggunakan penandaan partisipatif maupun ke dalam basis data peta digital.

Tahap Pendampingan Perencanaan Kebutuhan Fasilitas dan Penguatan Tata Kelola

Dilaksanakan pada pukul 13.00–15.00 WITA melalui metode diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion / FGD) dan analisis matriks. Peserta didampingi untuk mendata ketersediaan serta menilai kelayakan fisik fasilitas dasar dan fasilitas pendukung pariwisata (jalan akses, area parkir, toilet/sanitasi, tempat sampah, air bersih, tempat ibadah, gazebo, warung kuliner, papan informasi, dan spot foto). Berdasarkan analisis kesenjangan (gap analysis) tersebut, peserta menyusun skala prioritas penyediaan dan perbaikan fasilitas dengan mempertimbangkan tujuh parameter: kebutuhan masyarakat, kebutuhan pengunjung, kondisi lingkungan, aksesibilitas, ketersediaan sumber daya desa, potensi manfaat ekonomi, serta kemudahan pemeliharaan. Pada sesi ini, masyarakat juga merumuskan matriks pembagian peran antar-pemangku kepentingan dan rekomendasi awal pengembangan wisata desa.

Tahap Evaluasi Akhir (Post-Test) dan Penutupan

Dilaksanakan pada pukul 15.00–15.30 WITA, di mana seluruh peserta mengisi kembali instrumen kuesioner post-test untuk mengukur serapan materi serta merumuskan komitmen tindak lanjut pendampingan sebelum kegiatan ditutup secara resmi.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini diukur menggunakan tiga indikator capaian utama yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Indikator Peningkatan Kapasitas Kognitif Masyarakat

Tercapainya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep ekowisata, perencanaan berbasis potensi lokal dan spasial, manajemen lingkungan pesisir, serta tata kelola kelembagaan wisata, dengan target capaian minimal 80% peserta berhasil meraih kategori pemahaman Sangat Baik (nilai evaluasi ≥80,00 pada skala 0–100) serta rata-rata skor peningkatan ternormalisasi (N-Gain) berada pada kategori efektivitas tinggi (≥0,70).

Indikator Ketersediaan Dokumen Spasial dan Inventarisasi Destinasi

Tersusunnya dokumen inventarisasi potensi dan permasalahan wisata (mencakup kawasan Bukit Palluang Boko, Depaso Beach, dan kriya budaya *lipa sa'be*), peta atau sketsa partisipatif berbasis cetak dan digital, serta matriks skala prioritas kebutuhan fasilitas dasar dan pendukung pariwisata Desa Palipi Soreang.

Indikator Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan

Teridentifikasinya pembagian peran dan tanggung jawab kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, kelompok pemuda, pengelola wisata, dan pelaku UMKM/perajin yang terdokumentasi ke dalam matriks pembagian peran serta dokumen rekomendasi awal pengembangan wisata desa.

Metode Evaluasi

Teknik evaluasi untuk mengukur ketercapaian indikator keberhasilan dilakukan melalui dua pendekatan terpadu, yaitu evaluasi kuantitatif berbasis tes kognitif (pre-test post-test design) dan evaluasi kualitatif berbasis observasi kinerja produk lokakarya. Evaluasi kuantitatif dilaksanakan terhadap seluruh peserta (n = 30) menggunakan instrumen kuesioner terstruktur yang terdiri atas 10 butir pertanyaan pilihan ganda (bobot 10 poin untuk setiap jawaban benar; rentang skor total 0–100). Kesepuluh butir soal tersebut memetakan 10 indikator materi pokok, yaitu: (1) Konsep Dasar Ekowisata; (2) Prinsip Pengembangan Ekowisata; (3) Perencanaan Berbasis Potensi Lokal; (4) Identifikasi Potensi Lokal Desa Palipi Soreang; (5) Tujuan Pariwisata Berkelanjutan; (6) Konsep Tata Kelola Wisata; (7) Kolaborasi Pemangku Kepentingan (*Multi-Stakeholder*); (8) Partisipasi Aktif Masyarakat; (9) Kelembagaan dan Koordinasi Pengelolaan; serta (10) Manajemen Lingkungan Pesisir dan Pantai. Data hasil pre-test dan post-test dianalisis menggunakan statistik deskriptif (rata-rata/mean, nilai tengah/median, simpangan baku/standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum) serta dikelompokkan ke dalam empat kategori tingkat pemahaman: Kurang (< 40), Cukup (40-59), Baik (60-79), dan Sangat Baik (≥80). Selanjutnya, untuk mengukur tingkat efektivitas penyampaian materi pelatihan secara objektif, dilakukan perhitungan uji Normalized Gain (N-Gain) dengan rumus persamaan berikut:

$$N - Gain = \frac{\text{Skor Post Test} - \text{Skor Pre Test}}{\text{Skor Ideal (100)} - Skor\ Pre\ Test}$$

Nilai N-Gain yang diperoleh kemudian diinterpretasikan ke dalam kriteria efektivitas tinggi apabila mencapai skor N-Gain ≥0,70. Sementara itu, evaluasi kualitatif dilakukan melalui penilaian langsung terhadap kelengkapan luaran praktik peserta selama lokakarya berlangsung, meliputi keakuratan penandaan titik spasial pada peta partisipatif, ketajaman analisis kesenjangan pada tabel identifikasi fasilitas dasar dan pendukung, serta kejelasan rumusan matriks pembagian peran kelembagaan dalam mendukung perencanaan ekowisata Desa Palipi Soreang yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan kapasitas perencanaan pariwisata di Desa Palipi Soreang, Kabupaten Majene, berlangsung secara terstruktur, akuntabel, dan mendapatkan respons yang sangat antusias dari seluruh mitra sasaran. Rangkaian kegiatan diawali pada pukul 08.30 WITA dengan registrasi 30 orang peserta perwakilan multi-stakeholder desa, pengisian instrumen evaluasi awal (*pre-test*), serta pembukaan resmi oleh Kepala Desa Palipi Soreang (Wardin Wahid, S.H.) dan Kepala Pusat Studi Perencanaan, Lingkungan dan Pariwisata Universitas Sulawesi Barat (Nur Adyla S., S.T., M.T.). Dalam sesi pembukaan tersebut, terbangun komitmen bersama antara pihak perguruan tinggi dan pemerintah desa untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek utama dalam menata kawasan pesisir yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.



***Gambar 2**. Pembukaan Resmi oleh Kepala Desa Palipi Soreang*

Kegiatan inti pertama berupa sosialisasi dan penyuluhan materi Konsep Ekowisata dan Tata Kelola Wisata dilaksanakan pada pukul 09.00–11.00 WITA. Pada sesi ini, tim pengabdi memaparkan konsep dasar ekowisata, prinsip pariwisata berkelanjutan, teknik identifikasi potensi lokal, peran masyarakat, pengelolaan daya dukung lingkungan pesisir, serta tata kelola kelembagaan wisata. Diskusi berlangsung sangat interaktif, di mana para peserta aktif mengemukakan persoalan riil pengelolaan kawasan wisata di desa mereka serta menggali peluang keterlibatan warga lokal.



***Gambar 3**. Penyuluhan materi konsep ekowisata serta tata kelola wisata di Desa Palipi Soreang*

Tahapan selanjutnya pada pukul 11.00–12.00 WITA adalah lokakarya dan pelatihan pemetaan partisipatif (*participatory mapping*) destinasi, potensi, dan permasalahan wisata. Melalui pendampingan langsung dari tim pengabdi dan mahasiswa, peserta berlatih mengorientasikan peta dasar wilayah Desa Palipi Soreang dan berhasil memetakan titik-titik lokasi daya tarik wisata unggulan (Bukit Palluang Boko, Depaso Beach, serta sentra tenun budaya lipa sa'be), simpul aktivitas ekonomi masyarakat, jaringan aksesibilitas jalan, ketersediaan fasilitas eksisting, hingga titik-titik krusial permasalahan lingkungan pesisir. Seluruh informasi keruangan yang digali dari pengetahuan lokal warga tersebut langsung ditandai pada media peta cetak berukuran besar menggunakan penandaan partisipatif dan didigitalisasi ke dalam peta digital.



***Gambar 4**. Pelatihan Pemetaan Partisipatif*

Setelah jeda istirahat, rangkaian kegiatan dilanjutkan pada pukul 13.00–15.00 WITA dengan pelatihan perencanaan kebutuhan fasilitas dan penguatan tata kelola pengembangan wisata desa. Pada sesi praktik ini, peserta berhasil menyusun matriks

identifikasi ketersediaan dan kelayakan fisik fasilitas dasar (jalan akses, area parkir, toilet/sanitasi, tempat sampah, jaringan air bersih, tempat ibadah, dan keamanan/keselamatan) serta fasilitas pendukung pariwisata (gazebo, warung kuliner, toko cendera mata, loket, wahana, papan informasi, dan spot foto/selfie). Berdasarkan analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap kondisi lapangan, peserta menyepakati skala prioritas penyediaan dan perbaikan infrastruktur yang paling mendesak, sekaligus merumuskan matriks pembagian peran kolaboratif antar-pemangku kepentingan (pemerintah desa, Pokdarwis/pengelola wisata, pemuda Karang Taruna, pelaku UMKM/perajin, dan tokoh masyarakat) sebagai dokumen rekomendasi awal pengembangan wisata Desa Palipi Soreang. Aktivitas lokakarya pemetaan spasial dan perumusan matriks fasilitas serta kelembagaan ditampilkan pada Gambar 3.



***Gambar 5**. Perumusan matriks kebutuhan fasilitas dan pembagian peran tata kelola wisata*

Secara kuantitatif, hasil keseluruhan intervensi pengabdian ini diukur melalui perbandingan evaluasi kognitif pre-test dan post-test terhadap 30 peserta sasaran (n = 30) menggunakan 10 butir pertanyaan terstruktur (skala nilai 0–100). Hasil pengolahan statistik deskriptif membuktikan terjadinya lonjakan pemahaman masyarakat yang sangat signifikan setelah mengikuti rangkaian penyuluhan dan pelatihan. Rata-rata (mean) nilai pemahaman peserta meningkat tajam dari 57,00 (standar deviasi 10,55; kategori Cukup) pada saat pre-test menjadi 94,00 (standar deviasi 6,75; kategori Sangat Baik) pada saat post-test, atau mengalami rata-rata selisih peningkatan (gain) sebesar 37,00 poin dengan rata-rata skor Normalized Gain (N-Gain) mencapai 0,85 (0,8528) yang tergolong dalam kriteria efektivitas tinggi (≥0,70). Apabila pada kondisi awal tidak ada satu pun peserta (0,00%) yang mampu meraih kategori Sangat Baik (≥80), maka pasca-pelatihan seluruh peserta yang berjumlah 30 orang (100,00%) berhasil mencapai kategori Sangat Baik, bahkan separuh peserta (15 orang atau 50,00%) meraih skor sempurna 100,00. Rekapitulasi lengkap statistik deskriptif hasil evaluasi pre-test, post-test, dan N-Gain disajikan pada Tabel 1.

***Tabel 1**. Rekapitulasi statistik deskriptif hasil evaluasi pre-test, post-test, dan N-Gain peserta (n = 30)*

Parameter Statistik / Kategori	Jumlah Benar *Pre-Test* (Skala 0–10)	Nilai *Pre-Test* (Skala 0–100)	Jumlah Benar *Post-Test* (Skala 0–10)	Nilai *Post-Test* (Skala 0–100)	Selisih Peningkatan /Gain (Poin)	Skor N-Gain
Rata-Rata (Mean)	5,70	57,00	9,40	94,00	37,00	0,85 (0,8528)
Nilai Tengah (Median)	6,00	60,00	9,50	95,00	40,00	0,92 (0,9167)
Standar Deviasi (SD)	1,06	10,55	0,67	6,75	12,08	0,16
Nilai Tertinggi (Max)	7,00	70,00	10,00	100,00	60,00	1,00
Nilai Terendah (Min)	4,00	40,00	8,00	80,00	20,00	0,60
Kategori Sangat Baik (≥80)	-	0 peserta (0,00%)	-	30 peserta (100,00%)	-	-
Kategori Baik (60-79)	-	18 peserta (60,00%)	-	0 peserta (0,00%)	-	-
Kategori Cukup (40-59)	-	12 peserta (40,00%)	-	0 peserta (0,00%)	-	-
Kategori Kurang (< 40)	-	0 peserta (0,00%)	-	0 peserta (0,00%)	-	-
Efektivitas Tinggi (N-Gain ≥0,70)	-	-	-	-	-	21 peserta (70,00%)

Transformasi Kapasitas Kognitif dan Kesadaran Ekowisata Berkelanjutan

Secara umum, keberhasilan program pengabdian ini dalam meningkatkan rata-rata pemahaman masyarakat dari 57,00 menjadi 94,00 (skor N-Gain 0,85) beserta penurunan simpangan baku (standar deviasi) dari 10,55 menjadi 6,75 membuktikan bahwa metode penyuluhan interaktif yang dipadukan dengan lokakarya praktis mampu meratakan kesenjangan pengetahuan antar-elemen masyarakat Desa Palipi Soreang secara efektif. Dalam perspektif teoretis pengembangan pariwisata perdesaan, temuan ini mengonfirmasi tesis Tosun (2000), Reed (2008), serta Lee dan Jan (2019) bahwa hambatan utama partisipasi masyarakat lokal di negara berkembang sering kali bersumber dari keterbatasan kapasitas kognitif dan minimnya akses informasi mengenai prinsip keberlanjutan. Sebelum intervensi dilakukan, mayoritas masyarakat Desa Palipi Soreang telah mengenali aset fisik desanya dengan sangat baik tercermin dari tingginya skor pre-test pada indikator Identifikasi Potensi Lokal (Soal 4) yang mencapai 80,00% dan Manajemen Lingkungan Pesisir (Soal 10) sebesar 70,00% namun mereka belum memahami bagaimana mengonversi potensi tersebut ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan kelembagaan yang terstruktur.

Melalui intervensi edukasi yang mengacu pada prinsip The International Ecotourism Society (TIES, 2015) dan indikator pariwisata berkelanjutan UNWTO (2004), terjadi lompatan pemahaman tertinggi pada indikator Tujuan Pariwisata Berkelanjutan (Soal 5) sebesar 50,00 poin persentase (dari 36,67% menjadi 86,67%), diikuti oleh indikator Kelembagaan dan Koordinasi Pengelolaan (Soal 9) sebesar 46,67 poin persentase (dari 46,67% menjadi 93,33%), serta Konsep Dasar Ekowisata (Soal 1) dan Konsep Tata Kelola Wisata (Soal 6) yang masing-masing melonjak sebesar 43,33 poin persentase. Sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) dan konsep pemberdayaan stakeholder

dari Shafieisabet dan Haratifard (2020), penguatan pemahaman konseptual dan persepsi ekologis ini membentuk sikap positif serta norma subjektif kolektif warga bahwa pengembangan wisata di pesisir Selat Makassar tidak boleh merusak ekosistem laut, melainkan harus berjalan beriringan dengan pengendalian sampah domestik maupun sampah kiriman laut.

Efektivitas Pemetaan Spasial Partisipatif dan Perencanaan Kebutuhan Fasilitas

Penerapan metode pemetaan partisipatif (*participatory mapping*) dan perencanaan fasilitas dalam kegiatan ini berhasil menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoretis masyarakat dengan realitas keruangan Desa Palipi Soreang. Mengacu pada teori tangga partisipasi warga (*ladder of citizen participation*) dari Arnstein (1969) serta kerangka metodologi Public Participation Geographic Information Systems (PPGIS) dari Brown dan Kyttä (2018) serta Fagerholm et al. (2021), pelibatan aktif 30 peserta dalam menandai titik potensi dan masalah di atas peta cetak maupun peta digital telah mengangkat posisi masyarakat dari sekadar objek penerima informasi (*tokenism*) menjadi perencana kolaboratif (*partnership*). Pengetahuan spasial lokal (*indigenous spatial knowledge*) yang dimiliki oleh nelayan, petani, pemuda, dan perajin lipa sa'be memungkinkan teridentifikasinya titik-titik kritis penumpukan sampah pesisir, hambatan aksesibilitas menuju Bukit Palluang Boko dan Depaso Beach, serta sebaran sarana-prasarana yang mengalami kerusakan fisik secara jauh lebih akurat dibandingkan survei teknokratis semata.

Lebih lanjut, hasil pemetaan spasial tersebut memberikan landasan empiris yang kuat bagi masyarakat saat menyusun analisis kesenjangan (*gap analysis*) kebutuhan fasilitas dasar dan pendukung wisata. Sebagaimana ditekankan oleh Bichler (2021) dan Wondirad et al. (2020), kegagalan pengelolaan infrastruktur destinasi perdesaan umumnya terjadi karena pembangunan fasilitas tidak disesuaikan dengan kemampuan pemeliharaan komunitas lokal dan tidak disertai pembagian tanggung jawab kelembagaan yang jelas. Melalui penyusunan matriks prioritas fasilitas yang diintegrasikan dengan matriks pembagian peran multi-stakeholder (mencapai tingkat pemahaman *post-test* 96,67% pada Soal 7 dan 93,33% pada Soal 8 dan 9), masyarakat Desa Palipi Soreang kini memahami bahwa penyediaan dan pemeliharaan sanitasi, tempat sampah, jalan akses, hingga gazebo wisata bukan semata-mata beban Pemerintah Desa, melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan Pokdarwis, Karang Taruna, pelaku UMKM, dan warga sekitar. Meskipun demikian, hasil evaluasi post-test juga mengindikasikan bahwa dua indikator yakni Perencanaan Berbasis Potensi Lokal (Soal 3) dan Tujuan Pariwisata Berkelanjutan (Soal 5) memiliki ketercapaian akhir relatif paling rendah dibandingkan indikator lainnya (masing-masing 86,67% atau masih terdapat 4 peserta yang menjawab kurang tepat), sehingga aspek teknis penyusunan dokumen rencana induk berbasis potensi lokal ini perlu terus diperkuat melalui pendampingan lanjutan.

Aspek Kebermanfaatan Nyata bagi Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Secara keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah menghadirkan empat aspek kebermanfaatan langsung dan strategis yang dirasakan oleh mitra Pemerintah Desa serta masyarakat Desa Palipi Soreang.

Manfaat Kognitif dan Perubahan Pola Pikir (Mindset)

Mitra memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep ekowisata pesisir dan tata kelola pariwisata berkelanjutan (terbukti dari 100% peserta mencapai kategori Sangat Baik pada evaluasi akhir dan 100% peserta menguasai identifikasi potensi lokal desanya), sehingga tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan pantai dari pencemaran sampah demi kenyamanan wisatawan.

Manfaat Keterampilan Teknis Spasial

Masyarakat, khususnya unsur pemuda Karang Taruna dan perangkat desa, memperoleh keterampilan praktis baru dalam membaca orientasi wilayah, mengoperasikan instrumen pemetaan, serta memproduksi peta potensi dan permasalahan wisata baik dalam format peta cetak maupun peta digital.

Manfaat Ketersediaan Instrumen Kebijakan dan Perencanaan Desa

Pemerintah Desa Palipi Soreang memperoleh produk luaran konkret berupa peta partisipatif potensi dan masalah wisata, dokumen inventarisasi kondisi fasilitas eksisting, serta matriks skala prioritas kebutuhan fasilitas wisata. Dokumen ini sangat bermanfaat sebagai rujukan teknis berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam pengalokasian anggaran pembangunan desa agar lebih tepat sasaran.

Manfaat Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Kemitraan

Terbentuknya matriks pembagian peran *multi-stakeholder* dan terbangunnya komunikasi kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, pelaku UMKM/perajin lipa sa'be, dan Pusat Studi Perencanaan, Lingkungan dan Pariwisata Universitas Sulawesi Barat memberikan fondasi kelembagaan yang kokoh untuk menginisiasi pembentukan maupun penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) guna mendorong peningkatan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tridharma perguruan tinggi telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang akuntabel dan memuaskan. Penempatan jadwal alur waktu operasional harian yang efektif serta pemanfaatan dana realisasi, terbukti sukses mendukung kelancaran program di lapangan. Terjadi transformasi kapasitas pengetahuan tentang ekowisata dan tata kelola wisata pada peserta kegiatan secara signifikan yang diketahui dari hasil evaluasi test, peningkatan keterampilan dalam pemetaan potensi wisata, kemampuang mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan fasilitas wisata serta pemahaman tentang pentingnya keterlibatan setiap masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata di Desa Palipi Soreang.

Ucapan Terimakasih

Tim pengabdi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusat Studi Perencanaan, Lingkungan dan Pariwisata, Universitas Sulawesi Barat, atas dukungan pendanaan, fasilitasi kelembagaan, dan penugasan

pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2026 ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada Kepala Desa Palipi Soreang (Wardin Wahid, S.H.) beserta seluruh jajaran perangkat Pemerintah Desa, pengurus Karang Taruna, pengelola destinasi wisata, pelaku UMKM dan perajin tenun lipa sa'be, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Desa Palipi Soreang, Kabupaten Majene, atas sambutan hangat, kerja sama kemitraan, dan partisipasi aktifnya selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

Referensi

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Bello, F. G., Lovelock, B., & Carr, N. (2018). Enhancing community participation in ecotourism through institutional arrangements: A case of Malawi. *Journal of Ecotourism, 17*(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/14724049.2016.1251444

Bichler, B. F. (2021). Designing tourism governance: The role of local residents. *Journal of Destination Marketing & Management, 19*, 100389. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100389

Brown, G., & Kyttä, M. (2018). Key issues and priorities in participatory mapping: Toward integration or increased specialization? *Applied Geography, 95*, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.04.002

Cochran, F., Daniel, J., Jackson, L., & Neale, A. (2021). Earth observation-based ecosystem services indicators for national and subnational reporting of the Sustainable Development Goals. *Remote Sensing of Environment, 244*, 111796. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111796

Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: Empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism, 30*(10), 2352–2370. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1838527

Fagerholm, N., Raymond, C. M., Olafsson, A. S., Brown, G., Rinne, T., Hasanzadeh, K., Broberg, A., & Kyttä, M. (2021). A methodological framework for analysis of participatory mapping data in research, planning, and management. *International Journal of Geographical Information Science, 35*(9), 1848–1875. https://doi.org/10.1080/13658816.2020.1869747

Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 7*(4), 1–27.

Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies, 22*(3), 610–623. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748

Lee, T. H., & Jan, F. H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management, 70*, 368–380. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003

Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. *Biological Conservation, 141*(10), 2417–2431. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014

Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders' roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management, 45*, 387–398. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.09.005

Shafieisabet, N., & Haratifard, S. (2020). The empowerment of local tourism stakeholders and their perceived environmental effects for participation in sustainable development of tourism. *Journal of Hospitality and Tourism Management, 45*, 486–498. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.10.007

Stone, M. T., & Nyaupane, G. P. (2018). Protected areas, wildlife-based community tourism and community livelihoods dynamics: Spiraling up and down of community capitals. *Journal of Sustainable Tourism, 26*(2), 307–324. https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1349774

The International Ecotourism Society. (2015). What is ecotourism? TIES.

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management, 21*(6), 613–633. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1

Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management, 78*, 104024. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104024

World Tourism Organization. (2004). Indicators of sustainable development for tourism destinations: A guidebook. World Tourism Organization.